

PEDOMAN UNTUK MENDUKUNG Proyek Peningkatan Perikanan

Kerja sama antara berbagai pihak – kalangan pegiat hak lingkungan hidup, hak insani (HAM), dan hak pekerja, serta industri pangan laut – bisa memunculkan kekuatan dahsyat untuk meningkatkan aspek keberlanjutan lingkungan hidup di bidang penangkapan ikan.

EDISI REVISI
JULI 2022



CONSERVATION ALLIANCE
FOR SEAFOOD SOLUTIONS

SOLUTIONSFORSEAFOOD.ORG

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	3
DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN	3
PENGANTAR	5
DEFINISI FIP	7
Partisipasi	7
Komitmen Publik	8
Tujuan	8
Rencana Kerja	8
Pelacakan Kemajuan dan Pelaporan pada Publik	8
FIP PEMULA DAN FIP KOMPREHENSIF	10
Perbandingan antara FIP Pemula dan FIP Komprehensif	11
PROSES DALAM FIP	13
Tahapan Lingkungan Hidup pada FIP	13
TAHAP 0: Identifikasi FIP	13
TAHAP 1: Pembentukan FIP	13
TAHAP 2: Peluncuran FIP	14
TAHAP 3: Implementasi FIP	15
TAHAP 4: Peningkatan dalam Praktik Penangkapan Ikan atau Pengelolaan Perikanan	16
TAHAP 5: Peningkatan di Wilayah Perairan	16
Status FIP	17
Prospektif (Prospective)	17
Aktif, Selesai, dan Tidak Aktif (Active, Completed, and Inactive)	17
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN HAM DALAM FIP	18
PANDUAN DAN SUMBER DAYA TAMBAHAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL	20
HAM Mendasar	21
Hak Pekerja	21
Keadilan Gender	22
Tanggung Jawab Bisnis untuk Menghormati HAM	22
MEMBERIKAN DUKUNGAN PADA FIP	25
Dukungan Keuangan pada FIP	25
Menelaah ongkos/biaya dan argumentasi usaha untuk melakukan suatu FIP	25
Keputusan Pelaku Usaha untuk Terlibat Bekerja Sama dalam FIP	26
PENANDATANGAN	27

UCAPAN TERIMA KASIH

Alliance ingin menyampaikan penghargaan atas kerja keras dan dedikasi para anggota Kelompok Kerja Proses Revisi Pedoman FIP. Terima kasih!

Proses tinjauan atas Pedoman FIP ini dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan dari mayoritas besar Kelompok Kerja tersebut, dan hal tersebut telah berhasil dicapai.

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

Alliance	The Conservation Alliance for Seafood Solutions
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations Organisasi Pangan dan Pertanian – PBB
FIP	Fishery improvement project Proyek Peningkatan Perikanan
FRA	Financial Rapid Assessment Kajian Cepat Keuangan
Guidelines	Guidelines for Supporting Fishery Improvement Projects Pedoman untuk Mendukung Proyek Peningkatan Perikanan
HRDD	Human rights due diligence Uji Tuntas HAM
ILO	International Labour Organization Organisasi Perburuhan Internasional
MSC	Marine Stewardship Council
NGOs	Nongovernmental organizations Organisasi non-pemerintah, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
SRA	Social Responsibility Assessment Tool Instrumen Kajian Tanggung Jawab Sosial
UN	United Nations Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
WSR	Worker-driven Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial yang Didorong Pekerja

Kutipan: Conservation Alliance for Seafood Solutions. 2022. Guidelines for Supporting Fishery Improvements Projects. (Conservation Alliance for Seafood Solutions. 2022. Pedoman untuk Mendukung Proyek Peningkatan Perikanan.)



**PEDOMAN UNTUK MENDUKUNG
PROYEK PENINGKATAN PERIKANAN
(GUIDELINES FOR SUPPORTING
FISHERY IMPROVEMENT PROJECTS)**

Alliance mendukung upaya yang dilakukan oleh berbagai usaha perikanan untuk meningkatkan aspek tanggung jawab pada produk-produk pangan laut mereka.

PENGANTAR

Tahun 2008, Conservation Alliance for Seafood Solutions (selanjutnya disebut Alliance) menerbitkan Common Vision for Sustainable Seafood (Visi Bersama Menuju Pangan Laut Berkelanjutan), suatu pedoman yang menguraikan enam langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk menyusun dan menjalankan kebijakan pangan laut yang berkelanjutan. Salah satu langkah tersebut ialah agar para pengecer (retailer), pemasok (supplier), dan pengolah (processor) menetapkan keputusan untuk mengambil dari sumber yang bertanggung jawab. Untuk memenuhi langkah tersebut, para pembeli yang membeli pangan laut dari usaha perikanan yang masih belum memenuhi aspek keberlanjutan dapat menempuh berbagai strategi guna membantu mereka menuju ke arah keberlanjutan lingkungan hidup.

Salah satu strategi yang digunakan ialah dengan melibatkan para pemasok, produsen, dan mitra industri lainnya dalam suatu proyek peningkatan perikanan (FIP/fishery improvement project). Keputusan tentang apakah rantai pasok akan melibatkan FIP ada di tangan pembeli, dan akan tergantung pada persyaratan spesifik dalam kebijakan pangan laut bertanggung jawab di perusahaan tersebut. Tujuan utamanya ialah menciptakan insentif bagi terwujudnya perubahan yang positif dan dapat diukur di lautan dan pada pasokan pangan laut kita semua.

Tahun 2012, Alliance mengeluarkan Guidelines for Supporting FIPs (Pedoman untuk Mendukung FIP) dan menerbitkan edisi lanjutan (dengan pembaruan) di tahun 2015, 2019, 2021, dan 2022. Pedoman tersebut menjelaskan bagaimana standar penangkapan ikan dari Marine Stewardship Council (selanjutnya disebut MSC Fisheries Standard) digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan pada usaha perikanan, serta kemajuan berbagai FIP seiring dengan waktu. Semua usaha perikanan dapat menggunakan Standar MSC tersebut, meskipun mereka tidak berencana mendapatkan sertifikasi MSC. Adanya standar yang kredibel dan mudah diakses untuk mengukur kemajuan FIP memungkinkan para anggota dan perusahaan yang tergabung dalam Global Hub mengambil keputusan yang berdasarkan informasi terkait keikutsertaan atau aspek sumber perolehan (sourcing) dari proyek-proyek tersebut.

Melalui edisi terbaru di tahun 2022, Pedoman ini menguraikan bagaimana FIP menciptakan peluang untuk mendorong terjadinya perubahan melalui tindakan bersama antara sektor publik dan swasta guna mengatasi isu-isu HAM dan tenaga kerja. Untuk mengidentifikasi risiko sosial, Pedoman ini menyarankan agar FIP menggunakan Instrumen Kajian Tanggung Jawab Sosial untuk Sektor Pangan Laut (SRA/Social Responsibility Assessment Tool for the Seafood Sector), suatu instrumen kajian cepat yang dapat digunakan FIP untuk mengidentifikasi area risiko yang terkait dengan isu sosial, atau menggunakan perangkat lainnya.

Selain itu, Pedoman ini juga menjelaskan bagaimana FIP bertanggung jawab untuk membuat rencana kerja dengan tujuan yang memiliki tenggat waktu tertentu. Bila suatu usaha perikanan tidak menunjukkan peningkatan yang terukur dalam hal kinerja sosial dan lingkungan hidup di perusahaan tersebut seiring dengan waktu, maka Alliance menyarankan agar para pembeli dan pemasok menyampaikan kekhawatiran mereka tentang minimnya kemajuan tersebut. Bila tetap saja tidak ada perbaikan yang terjadi setelah interaksi langsung dengan proyek tersebut, Alliance menyarankan agar perusahaan mengambil langkah-langkah tambahan yang sejalan dengan tujuan dan persyaratan yang diatur dalam kebijakan mereka tentang pangan laut bertanggung jawab, yang bisa mencakup tidak lagi membeli pangan laut dari sumber tersebut dan menyampaikan alasannya.

Alliance meyakini bahwa FIP hendaknya berupaya memenuhi aspek keberlanjutan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial pada taraf tinggi yang memungkinkan usaha perikanan—serta masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada mereka—untuk menjadi makmur. Pada akhirnya, seluruh peserta FIP diharapkan berupaya mencapai tingkat kinerja lingkungan hidup yang sejalan dengan MSC Fisheries Standard, tanpa syarat/pengecualian tertentu. Dapat dipahami bahwa kinerja pada taraf ini merupakan tujuan jangka panjang di beberapa usaha penangkapan ikan.

Pedoman tahun 2022 ini mencerminkan pemahaman terkini atas praktik-praktik terbaik FIP. Alliance amat meyakini bahwa melakukan standardisasi atas struktur dan proses dalam FIP merupakan hal yang esensial agar perusahaan pangan laut dapat membantu dan mendukung mereka memenuhi komitmen di bidang HAM serta tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup.

DEFINISI PROYEK PENINGKATAN PERIKANAN (FIP/FISHERY IMPROVEMENT PROJECT)

FIP merupakan upaya berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai tantangan di suatu usaha perikanan. Proyek-proyek FIP ini menggunakan kekuatan sektor swasta untuk memberikan insentif bagi terwujudnya perubahan positif di usaha perikanan dan berupaya agar perubahan-perubahan tersebut dapat bertahan lama, dengan adanya perubahan kebijakan. FIP selalu memasukkan tujuan yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak FIP mulai mengatasi isu-isu lain, seperti misalnya hak-hak insani (HAM), tanggung jawab sosial, dan kesinambungan keuangan.

DEFINISI FIP

Berikut ini adalah unsur-unsur utama suatu FIP.

PARTISIPASI

Para peserta FIP, termasuk para pelaku di bidang rantai pasok dan pemangku kepentingan lainnya, bisa saja masuk ke dalam lebih dari satu kategori di bawah ini. Seberapa jauh mereka terlibat dalam FIP akan tergantung pada tujuan perbaikan yang ingin dicapai. Suatu FIP harus mencakup partisipasi aktif oleh produsen atau pelaku lainnya dalam rantai pasok, sebagaimana diuraikan di bawah ini. Partisipasi aktif berarti memberikan dukungan berupa uang atau barang/jasa¹ kepada FIP, menjalankan upaya yang telah diuraikan dalam rencana kerja, atau keduanya. Kelompok-kelompok yang berpotensi terdampak oleh kegiatan FIP namun tidak memenuhi definisi “partisipasi aktif” hendaknya juga dilibatkan dalam konsultasi saat merencanakan dan menjalankan FIP.

- **Produsen** (e.g., penangkap ikan, pemegang hak penangkapan ikan, atau kelompok-kelompok yang mewakili mereka) hendaknya dilibatkan dalam membentuk FIP sejak awal. Para produsen secara langsung terkena dampak dari perubahan yang diterapkan pada usaha penangkapan ikan sebagai akibat dari FIP, dan mereka punya sejumlah besar pengetahuan tentang penangkapan ikan. Produsen juga bisa berperan penting dengan turut serta dalam berbagai pertemuan terkait FIP dan dalam menjalankan berbagai kegiatan spesifik FIP bilamana sesuai (e.g., perubahan alat penangkap ikan, menghadirkan pengamat di kapal, dll.)
- **Pelaku rantai pasok** (e.g., pengolah, perantara, pelaku ekspor, pelaku impor, distributor, penyedia jasa pangan, dan pengecer/retailer) dapat mendukung FIP melalui kontribusi berupa uang atau barang/jasa, dukungan politik, kebijakan pengadaan, serta membantu memberi arahan pada pencapaian tujuan jangka panjang yang berdasarkan persyaratan yang berlaku di pasar terkait aspek keberlanjutan.

1 The Ford Family Foundation mendefinisikan kontribusi berupa barang/jasa (in-kind contributions) sebagai “jasa, materi, peralatan, atau tenaga kerja yang diberikan berupa komitmen atau yang diterimakan dalam nominal konservatif yang mana tanpanya proyek akan mengeluarkan biaya dari anggaran mereka untuk membayarkan hal-hal tersebut. Pihak donor dan jasa yang diterima hendaknya diidentifikasi. Dengan kata lain, kontribusi berupa barang/jasa ini adalah pemberian barang (dalam nominal grosir) atau jasa, alih-alih uang tunai, yang diberikan untuk salah satu mata anggaran dalam proyek. Proyek penerimaan dan pengeluaran hendaknya mencerminkan adanya kontribusi berupa barang/jasa ini.” (Sumber: The Ford Family Foundation. “How to Calculate In-Kind Contributions.” Diakses pada 14 Juni 2022.)
<https://www.tfff.org/how-we-fund/grants/guidance-eligibility/how-calculate-kind-contributions>.

- **Organisasi non-pemerintah atau LSM (NGO)** (e.g., serikat buruh dan serikat pekerja, organisasi di bidang sosial dan lingkungan hidup) dapat dilibatkan dalam FIP melalui berbagai cara, termasuk dalam menjalankan peran koordinasi/pertimbangan, mewadahi pemangku kepentingan, dan menjalankan kegiatan FIP. Dalam beberapa kasus, entitas-entitas tersebut bisa saja memberikan dukungan finansial dan hubungan ke sumber daya lainnya, seperti misalnya para pakar ilmiah.
- **Pakar ilmiah** dan peneliti dapat mendukung penelitian dan mengumpulkan data relevan di bidang lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Keahlian semacam ini diperlukan guna memastikan kegiatan-kegiatan FIP dapat membawa hasil yang mantap yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pengelolaan oleh pemerintah.
- **Pemerintah** melalui keterlibatan, upaya tindakan, dan pengawasan mungkin diperlukan ketika suatu FIP memerlukan perubahan signifikan dalam pengelolaan perikanan. Dalam hubungan kerja sama antara suatu FIP dan suatu lembaga pemerintah, pihak FIP dapat memberikan akses pada pembiayaan sektor swasta yang mendukung upaya ilmiah yang tidak dapat dilakukan pemerintah. Selain itu, pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan FIP telah dirancang dengan tepat dan membawa hasil yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perikanan dengan lebih baik.

KOMITMEN PUBLIK

Peserta harus memberikan komitmen untuk melakukan investasi keuangan sekaligus meningkatkan perikanan (secara langsung atau dalam bentuk barang/jasa). Hal ini dapat dilakukan melalui penandatanganan suatu nota kesepahaman (MoU), mempublikasikan daftar peserta, dll.

TUJUAN

Suatu FIP harus menetapkan lingkup jangka pendek pada proyeknya, dengan serangkaian tujuan dengan kerangka waktu tertentu.

RENCANA KERJA

Suatu FIP harus menyusun dan menjalankan suatu rencana kerja, termasuk anggaran dan tenggat waktu yang terkait, yang dirancang untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam risiko di bidang perikanan dan tanggung jawab sosial guna mencapai tujuan proyek. Rencana kerja dan tenggat waktu tersebut harus tersedia bagi publik. Untuk anggaran, tidak ada keharusan untuk mengungkapkan anggaran kepada publik.

PELACAKAN KEMAJUAN DAN PELAPORAN PADA PUBLIK

Suatu FIP harus secara rutin melacak dan melaporkan kemajuan yang diperolehnya, termasuk 1) menyampaikan laporan pada publik terkait kemajuan upaya yang dilakukan serta hasilnya, dengan berbagai dokumentasi pendukung, tiap enam bulan, dan 2) melakukan pemutakhiran skor indikator dan menyediakan bukti pendukung atas perubahan skor yang terjadi tiap 12 bulan. Semua FIP diharapkan menunjukkan kemajuan seiring dengan waktu.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, FIP harus melakukan pemutakhiran data secara rutin, dan berbagai perubahan/perbaikan yang terjadi harus dikaitkan dengan bukti yang kredibel. Selain itu, guna memastikan kredibilitasnya, data tersebut juga harus ditinjau oleh suatu pihak ketiga. Alliance amat merekomendasikan agar proyek turut masuk dalam daftar FisheryProgress sehingga dapat dilakukan pelaporan publik dengan mengikuti standar yang ada, nota kesepahaman (MoU), publikasi daftar peserta, dll.

TENTANG FISHERYPROGRESS DAN FISHSOURCE

[FisheryProgress](#) memberikan wadah/platform terpusat bagi FIP untuk melakukan pemutakhiran data proyek setiap enam bulan. Staf FishChoice meninjau data semua data yang ada guna memastikan data tersebut lengkap, akurat, kredibel, dan sesuai dengan kinerja di lapangan serta persyaratan pelaporan sebelum data tersebut dipublikasikan. Selain itu, industri pangan laut dan LSM menggunakan FisheryProgress untuk melacak FIP dan mencari informasi yang andal dan baku (memenuhi standar tertentu). Sebagai contoh, FisheryProgress membantu memudahkan perusahaan pangan laut dan pemangku kepentingan lain untuk meninjau tahap dan status suatu FIP serta menentukan apakah mereka bersedia mendukung atau mengambil/membeli dari suatu FIP. Situs web ini didukung oleh FishChoice, anggota Alliance Global Hub.

[FishSource](#) menyediakan informasi yang terbaru, tidak memihak, dan dapat ditindaklanjuti kepada perusahaan dan LSM terkait aspek keberlanjutan pada usaha perikanan serta berbagai peningkatan yang perlu dilakukan oleh usaha perikanan tersebut untuk menjadi usaha yang lebih memperhatikan aspek berkelanjutan, termasuk penilaian (rating) kemajuan FIP. Situs web ini dibuat oleh Sustainable Fisheries Partnership, anggota Alliance Global Hub.



FIP PEMULA DAN FIP KOMPREHENSIF

Alliance telah menetapkan adanya dua jenis FIP: pemula dan komprehensif. Kedua jenis FIP ini harus mengatasi berbagai risiko sosial.

FIP PEMULA (BASIC)

FIP Pemula merupakan titik masuk yang baik bagi usaha perikanan untuk mulai mengatasi berbagai tantangan/permasalahan lingkungan hidup secara spesifik.

FIP KOMPREHENSIF (COMPREHENSIVE)

FIP Komprehensif bertujuan mengatasi berbagai tantangan/ permasalahan lingkungan hidup secara keseluruhan, agar suatu usaha perikanan dapat mencapai keberlanjutan pada tingkat tinggi.

Perbedaan utama antara FIP Pemula dan FIP Komprehensif ialah pada derajat lingkup yang akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja, tujuan, dan persyaratan verifikasi. Alliance mendorong usaha perikanan untuk mengembangkan proyek-proyek baru dalam peningkatan usaha perikanan agar dapat menjadi FIP Komprehensif. Alliance juga mendorong FIP Pemula untuk berupaya menjadi FIP Komprehensif seiring dengan waktu.

PERBANDINGAN ANTARA FIP PEMULA DAN FIP KOMPREHENSIF

	PEMULA	KOMPREHENSIF
Lingkup	FIP melakukan kajian kebutuhan dan dokumen penetapan lingkup yang sifatnya opsional berdasarkan standar yang tercantum pada MSC Fisheries Standard guna mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi di bidang lingkungan hidup. Kajian kebutuhan ini harus mencakup, paling tidak, satu indikator dari tiap area utama (principal areas) pada tiga area utama yang ada pada MSC Fisheries Standard.	FIP melibatkan pihak yang berpengalaman dalam menerapkan MSC Fisheries Standard dalam menyusun dokumen pra-kajian MSC dan dokumen penetapan lingkup yang sifatnya opsional. Yang dimaksud dengan pihak yang berpengalaman menerapkan MSC Fisheries Standard mengacu pada konsultan teknis yang terdaftar di MSC (registered MSC technical consultant), lembaga penilai kesesuaian yang telah terakreditasi (accredited conformity assessment body), atau orang yang memiliki kualifikasi lain yang sesuai (someone who has other demonstrated qualifications) yang memenuhi kriteria FisheryProgress.
Tujuan	FIP menentukan tujuan dengan kerangka waktu tertentu guna mengatasi beberapa tantangan lingkungan hidup yang dihadapi oleh usaha perikanan. Suatu FIP Pemula bertujuan mencapai tingkat kinerja yang sesuai dengan skor 80 atau lebih untuk indikator kinerja MSC yang terkait.	FIP menentukan tujuan dengan kerangka waktu tertentu guna mengatasi seluruh tantangan lingkungan hidup yang dihadapi oleh usaha perikanan guna mencapai tingkat kinerja yang sesuai dengan skor 80 atau lebih untuk semua indikator kinerja MSC.
Rencana Kerja	Berdasarkan kajian kebutuhan, dokumen penetapan lingkup yang bersifat opsional, serta masukan dari peserta, FIP menyusun suatu rencana kerja yang menguraikan berbagai tindakan yang akan dapat meningkatkan kinerja usaha perikanan di bidang lingkungan hidup yang sesuai dengan tujuan dalam rencana kerja tersebut. Untuk FIP Komprehensif, rencana kerja tersebut harus disusun oleh pihak yang berpengalaman menerapkan standar pada MSC Fisheries Standard ² .	

2 Pihak yang berpengalaman menerapkan [MSC Fisheries Standard](#) mengacu pada konsultan teknis yang terdaftar di MSC ([registered MSC technical consultant](#)), lembaga penilai kesesuaian yang telah terakreditasi ([accredited conformity assessment body](#)), atau orang yang memiliki kualifikasi lain yang sesuai ([someone who has other demonstrated qualifications](#)) yang memenuhi kriteria FisheryProgress.

PERBANDINGAN ANTARA FIP PEMULA DAN FIP KOMPREHENSIF

	PEMULA	KOMPREHENSIF
Verifikasi kemajuan	FIP didorong untuk melakukan evaluasi independen atas hasil upaya serta kinerja yang dibandingkan dengan standar pada MSC Fisheries Standard, namun hal ini tidak bersifat wajib.	Tiap tiga tahun, FIP Komprehensif harus mengatur adanya evaluasi independen atas hasil upaya dan kinerja yang dibandingkan dengan standar pada MSC Fisheries Standard. Pihak evaluator harus punya pengalaman dengan MSC Fisheries Standard dan lepas (independen) dari organisasi yang menjalankan FIP.
	Evaluasi dalam bentuk tatap muka langsung merupakan bentuk yang disarankan. Alliance amat menyarankan untuk mengikuti Pedoman Praktik Terbaik Pelaksanaan Pemeriksaan Jarak Jauh yang dikeluarkan oleh ISEAL (ISEAL's Guidance on Remote Auditing Good Practices) apabila evaluasi dilakukan secara jarak jauh.	
Tanggung Jawab Sosial dan HAM	Semua FIP harus, paling tidak, memenuhi berbagai persyaratan yang telah tercantum pada Kebijakan Sosial dan HAM FisheryProgress atau menggunakan pendekatan yang paling tidak setara, guna mengatasi berbagai risiko sosial.	

PROSES DALAM FIP

Ada lima tahap dalam hal kemajuan di bidang lingkungan hidup pada suatu FIP, beserta empat status, sebagaimana didefinisikan di bawah ini. Meskipun jalur menuju terwujudnya peningkatan tidaklah selalu berjalan lurus/linear, berbagai tahap dan status tersebut membantu berbagai kelompok dan perusahaan dalam mengevaluasi proyek lingkungan hidup dan mengambil keputusan terkait interaksi kerja sama dan/atau sumber perolehan.

TAHAPAN LINGKUNGAN HIDUP PADA FIP

TAHAP 0: Identifikasi FIP

TAHAP 0

Dilakukan identifikasi atas usaha perikanan sasaran yang dapat memperoleh manfaat dari suatu FIP, dan dilakukan suatu analisis rantai pasok guna memahami siapa saja yang berpartisipasi dalam usaha perikanan tersebut dan apa saja pengaruh pasar yang ada.

TAHAP 1: Pembentukan FIP

TAHAP 1

Kinerja usaha perikanan dievaluasi dibandingkan dengan MSC Fisheries Standard, dan para pemangku kepentingan diajak untuk berpartisipasi. Secara khusus, tahap pembentukan ini turut mencakup:

- **Kajian atas kinerja lingkungan hidup pada usaha perikanan tersebut.**
 - FIP pemula melakukan kajian kebutuhan yang harus mencakup, paling tidak, satu indikator dari tiap area utama pada tiga area utama yang ada pada MSC Fisheries Standard guna menentukan apa saja tantangan lingkungan hidup serta peningkatan/perbaikan yang diperlukan dalam usaha perikanan tersebut. Alliance menyarankan agar FIP Pemula memasukkan semua indikator MSC dalam kajian kebutuhan mereka, bila memungkinkan, dan mempertimbangkan menggunakan pra-kajian MSC untuk mengkaji kebutuhan mereka apabila mereka mengantisipasi terjadinya transisi ke arah FIP Komprehensif di masa mendatang.
 - FIP Komprehensif melakukan pra-kajian MSC guna menentukan bagian-bagian mana saja di usaha perikanan yang masih menunjukkan kekurangan bila dibandingkan dengan MSC Fisheries Standard. Pra-kajian harus dilakukan oleh pihak yang berpengalaman dalam penerapan MSC Fisheries Standard.
- **Dokumen penetapan lingkup.**

Dokumen penetapan lingkup merupakan perangkat yang sifatnya opsional (pilihan) yang merangkumkan hasil dari kajian kebutuhan/prakajian MSC dan mencantumkan rekomendasi strategi untuk mengatasi berbagai tantangan pada usaha perikanan yang bersangkutan. Ketika sudah selesai disusun, dokumen lingkup ini harus dibuat terbuka bagi publik. Bila suatu dokumen lingkup sudah selesai disusun, dokumen tersebut harus dibuat terbuka bagi publik, dan, untuk FIP Komprehensif, dokumen tersebut harus disusun atau dievaluasi oleh pihak yang telah berpengalaman dalam menerapkan standar MSC.

- **Peta pemangku kepentingan dan proses pelibatan kerja sama.**

Peta pemangku kepentingan mengidentifikasi pihak-pihak yang paling relevan bagi FIP yang bersangkutan, termasuk produsen, pelaku rantai pasok, LSM, pakar ilmiah, dan pemerintah. Proses pemetaan dan pelibatan kerja sama hendaknya memperhatikan keseluruhan pemangku kepentingan yang akan terdampak oleh proyek atau yang memiliki peran dalam mengatasi berbagai tantangan dalam usaha perikanan.

FIP didorong agar transparan dalam proses menambahkan peserta. Selain itu, ketika masih dalam tahap pembentukan, proyek didorong untuk mencari tahu apakah terdapat proyek peningkatan lain yang ada di usaha perikanan yang sama, dan bila memang demikian, agar dilakukan kolaborasi dengan proyek lain tersebut bila memungkinkan – alih-alih mengulangi/menduplikasi upaya yang sudah dilakukan. Pihak pelaksana dapat mengecek FisheryProgress atau FishSource untuk mencari tahu apakah ada proyek peningkatan lain yang aktif atau yang akan berjalan di usaha perikanan yang sama.



TAHAP 2: Peluncuran FIP

Penetapan peserta, tujuan, dan rencana kerja proyek diselesaikan dan kemudian dipublikasikan. Tahap peluncuran turut mencakup:

- **Konfirmasi terkait siapa yang menjadi peserta proyek.** Daftar peserta FIP disampaikan kepada publik, dan nota kesepahaman (MoU) juga dapat disampaikan untuk memberikan detail tambahan terkait peran para peserta.
- **Pertemuan peserta.** Peserta FIP bertemu untuk mendiskusikan kajian kebutuhan/ pra-kajian MSC serta menentukan langkah ke depan.
- **Tujuan.** Alliance menyarankan agar pihak pelaksana menguraikan proses yang akan dijalankan ke dalam serangkaian tujuan dengan kerangka waktu tertentu, yaitu selama lima tahun atau kurang dari lima tahun.
 - Tujuan pada FIP Pemula harus mengatasi serangkaian tantangan lingkungan hidup yang dihadapi oleh usaha perikanan. FIP Pemula perlu mencapai tingkat kinerja yang sejalan dengan skor 80 atau lebih untuk indikator kinerja MSC yang relevan.
 - Tujuan pada FIP Komprehensif harus mengatasi seluruh tantangan lingkungan hidup yang dihadapi oleh usaha perikanan guna mencapai tingkat kinerja yang sejalan dengan skor 80 atau lebih untuk semua indikator kinerja MSC.
- **Rencana Kerja.** Berdasarkan kajian kebutuhan, dokumen opsional penetapan lingkup, dan masukan dari peserta, FIP kemudian menyusun suatu rencana kerja yang mencakup berbagai upaya/tindakan yang diperlukan guna memenuhi tujuan proyek. Untuk FIP Komprehensif, rencana kerja tersebut harus disusun oleh pihak yang berpengalaman menerapkan MSC Fisheries Standard. Rencana kerja tersebut harus mencantumkan upaya/tindakan yang akan dilakukan, pihak yang bertanggung jawab, dan perkiraan jangka waktu untuk menyelesaikan tiap tugas dan upaya/tindakan:
 - Upaya/tindakan adalah kegiatan utama yang harus dirampungkan guna menyelesaikan berbagai kekurangan yang telah diidentifikasi dalam kajian kebutuhan/ pra-kajian MSC. Rencana kerja juga dapat mencantumkan berbagai tugas, yang merupakan uraian atas upaya/tindakan yang akan dilakukan ke dalam berbagai

langkah spesifik yang menunjukkan bagaimana upaya/tindakan tersebut akan dapat diselesaikan.

- Pihak yang bertanggung jawab ialah orang dan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tiap upaya/tindakan.
- Perkiraan jangka waktu menunjukkan antisipasi atas tanggal mulai dan tanggal selesai untuk tiap tugas dan upaya/tindakan (e.g., Januari 2023 – Juni 2023).
- **Anggaran.** Anggaran perlu dicantumkan, dan mencakup, paling tidak, daftar sumber penerimaan dan pengeluaran utama untuk FIP yang bersangkutan. Anggaran tersebut dapat menyatakan sumber penerimaan secara anonim atau dalam bentuk agregat, dan hal ini dapat mencakup kontribusi berupa barang/jasa maupun kontribusi berupa dana/uang. Anggaran tersebut harus diperbarui tiap tahun. Peserta FIP harus mengikuti anggaran tersebut, meskipun perincian anggaran dimaksud tidak harus diungkap kepada publik.

Di Tahap 2, rencana kerja dimaksud harus dibuka untuk publik. Dalam menyusun rencana kerja, Alliance juga menyarankan agar dilakukan kajian atas risiko yang mungkin berdampak pada kemampuan usaha perikanan untuk mencapai kemajuan sebagaimana direncanakan.

TAHAP 3

TAHAP 3: Implementasi FIP

FIP mulai melakukan upaya/tindakan untuk mencapai peningkatan dan melacak kemajuan yang diraih. Tahap ini turut mencakup:

- **Menjalankan upaya/tindakan yang tercantum dalam rencana kerja** dan melakukan kerja sama secara konsisten dengan pihak regulator sehubungan dengan upaya/tindakan tersebut.
- **Melakukan pelacakan dan pelaporan kemajuan.** FIP Pemula dan FIP Komprehensif menyampaikan laporan atas kemajuan mereka sebagai berikut:
 - Tiap enam bulan, melaporkan kemajuan mereka atas upaya/tindakan yang tercantum dalam rencana kerja serta hasilnya, beserta dengan dokumentasi pendukung, dan disampaikan pada publik.
 - Tiap 12 bulan, melakukan pemutakhiran atas skor indikator dan memberikan bukti pendukung apabila terjadi perubahan skor.
 - Tiap tiga tahun, FIP Komprehensif harus mengatur agar dilakukan evaluasi independen atas berbagai hasil upaya/tindakan serta kinerja yang diperoleh, dengan dibandingkan dengan MSC Fisheries Standard (e.g., perubahan dalam kebijakan penangkapan ikan, manajemen, atau praktik penangkapan ikan, dan pada ujungnya, kesehatan usaha perikanan dimaksud). Evaluasi tersebut harus dilakukan oleh pihak yang berpengalaman menerapkan MSC Fisheries Standard yang juga adalah pihak yang lepas (independen) dari organisasi yang menjalankan FIP.
- **Perbaikan arah tindakan, bila diperlukan.** Bila suatu FIP tidak dapat mewujudkan upaya/tindakan yang telah dicantumkan dalam rencana kerjanya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, proyek tersebut hendaknya melaporkan alasan-alasan mengapa upaya/tindakan tersebut meleset, serta memperbarui rencana kerjanya sehingga merefleksikan penyesuaian upaya/tindakan yang akan dilakukan beserta kerangka waktunya.

TAHAP 4

TAHAP 4: Peningkatan dalam Praktik Penangkapan Ikan atau Pengelolaan Perikanan

FIP mendokumentasikan apabila ada peningkatan yang diraih berdasarkan implementasi rencana kerja mereka. Peningkatan dalam tahap ini turut mencakup:

- **Perbaikan dalam hal kebijakan, manajemen/pengelolaan, atau praktik penangkapan ikan.**
- **Kenaikan skor indikator kinerja MSC yang difokuskan pada aspek manajemen atau informasi.**

TAHAP 5

TAHAP 5: Peningkatan di Wilayah Perairan

FIP mendokumentasikan apabila terdapat peningkatan di wilayah perairan. Peningkatan dalam tahap ini turut mencakup:

- **Kenaikan skor indikator kinerja MSC yang difokuskan pada aspek capaian hasil (outcome).**
- **Perubahan yang dapat diverifikasi yang terjadi di wilayah perairan**, seperti misalnya turunnya kematian ikan, naiknya biomassa pada stok ikan sasaran, berkurangnya dampak habitat, dll.

Catatan: Tahap 4 dan 5 tidak serta-merta bersifat berurutan. Tahap-tahap ini mengevaluasi FIP berdasarkan dua hasil yang berbeda. Kedua tahap ini bisa saja tidak harus ada untuk tiap FIP.



STATUS FIP

Prospektif (Prospective)

FIP dianggap berstatus prospektif ketika mereka ada di Tahap 0 (Identifikasi FIP) atau Tahap 1 (Pembentukan FIP). FIP dapat berstatus prospektif hingga selama 12 bulan.

Maksud dari penyusunan daftar proyek prospektif ialah untuk membantu pelaku usaha dalam mengidentifikasi FIP agar mereka dapat ikut serta di dalamnya, serta mencegah terbentuknya beberapa FIP yang mencakup kawasan geografis/spesies yang sama. Begitu suatu FIP menyelesaikan Tahap 2 (Peluncuran FIP), FIP tersebut dianggap berstatus aktif.

Aktif, Selesai, dan Tidak Aktif (Active, Completed, and Inactive)

FIP di Tahap 3-5 dianggap berstatus aktif sampai mereka dapat memberikan verifikasi independen bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka atau mendapatkan sertifikasi MSC, yang mana kemudian mereka akan dianggap telah rampung/selesai.

Suatu FIP akan dianggap tidak aktif bila FIP tersebut:

1. melaporkan upaya yang dihentikan tanpa mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
2. tidak menyampaikan laporan secara publik dalam dua belas bulan³;
3. tidak melaporkan hasil dari Tahap 4 atau 5 dalam waktu tiga tahun;
4. tidak dapat memenuhi persyaratan minimum sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini, termasuk di bagian Tanggung Jawab Sosial dan HAM di bawah ini.

Informasi Tambahan

[FisheryProgress FIP Review Guidelines \(Pedoman Tinjauan FIP\)](#)

[FisheryProgress FIP Social Review Guidelines \(Pedoman Tinjauan Sosial FIP\)](#)

[FisheryProgress templates for launching a FIP \(template peluncuran FIP\)](#)

³ Untuk dapat kembali ke status aktif, FIP harus sepenuhnya memperbarui pelaporan publiknya.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN HAM DALAM FIP

Kerangka pada suatu FIP menciptakan peluang untuk mendorong terjadinya perubahan melalui upaya bersama antara publik dan swasta guna mengatasi isu hak insani (HAM) dan hak pekerja.

Peserta FIP dapat secara bersama-sama melakukan advokasi kepada pihak pemerintah agar meningkatkan peraturan dan pengawasan di bidang HAM dan ketenagakerjaan. FIP juga dapat mengundang serikat pekerja, organisasi penangkap ikan, atau kelompok perwakilan lainnya guna berpartisipasi dalam (atau bermitra dengan) FIP demi meningkatkan komunikasi dengan pelaku penangkapan ikan, pekerja, dan kelompok masyarakat mereka, dan memastikan bahwa upaya/tindakan yang dilakukan FIP tidak membawa dampak buruk terhadap mereka.

FIP didorong untuk menelaah berbagai isu sosial yang mungkin ada dalam usaha perikanan mereka – mulai dari pelanggaran HAM dan isu ketenagakerjaan hingga dampaknya ke masyarakat – dan menetapkan prioritas atas isu mana saja yang akan diatasi melalui rencana kerjanya.

Alliance meyakini bahwa semua FIP punya peran dalam mengatasi risiko sosial. Semua FIP harus, paling tidak, memenuhi persyaratan sebagai berikut⁴:

1. Menunjukkan adanya pernyataan kebijakan publik yang menguraikan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan HAM⁵.
2. Memberikan informasi tentang kapal atau pekerja penangkap ikan yang masuk dalam FIP.
3. Melakukan upaya terbaik untuk menyampaikan pada pekerja penangkap ikan tentang apa saja yang menjadi hak mereka.
4. Menunjukkan bahwa terdapat mekanisme pengaduan untuk semua pekerja penangkap ikan dalam FIP.
5. Bila FIP beroperasi dalam konteks berisiko tinggi, melakukan kajian risiko berdasarkan Instrumen Kajian Tanggung Jawab Sosial bagi Sektor Pangan Laut (SRA/Social Responsibility Assessment Tool for the Seafood Sector) (lihat Halaman 17 untuk informasi lebih lanjut) atau perangkat/instrumen lain yang paling tidak bersifat setara yang memperhatikan berbagai isu sosial yang tercakup dalam SRA.
6. Menyusun rencana kerja sosial untuk mengatasi, paling tidak, semua area yang berisiko tinggi.
7. Melakukan pelaporan publik atas Kriteria 1-6.

⁴ Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan HAM (Human Rights and Social Responsibility Policy) The FisheryProgress sepenuhnya mengikuti persyaratan tersebut. FIP yang tidak menyampaikan laporan melalui platform FisheryProgress harus menggunakan pendekatan yang paling tidak setara dengan kebijakan tersebut.

⁵ Tiga prinsip pangan laut yang memenuhi tanggung jawab sosial sebagaimana tercantum dalam The Monterey Framework ialah 1) melindungi HAM, martabat, dan akses pada sumber daya; 2) memastikan kesetaraan dan kesamaan peluang untuk mendapatkan manfaat; dan 3) meningkatkan ketahanan pangan dan penghidupan. (Sumber: RISE. "The Monterey Framework: Defining Social Responsibility in the Seafood Sector." Diakses pada 15 Juni 2022. <https://riseseafood.org/topics/actioning-the-monterey-framework/>

Tergantung pada aturan hukum yang berlaku pada negara/yurisdiksi tempat beroperasinya perusahaan yang bersangkutan, perusahaan bisa saja diminta bertanggung jawab secara pidana, perdata, atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi pelanggaran hak insani (HAM) dan hak pekerja, seperti misalnya perdagangan manusia, serta kerja paksa dan pekerja anak yang membahayakan, dalam rantai pasoknya.

Oleh karena itu, Alliance menyarankan agar perusahaan meminta bantuan dari sumber daya yang memang pakar di bidang HAM di tingkat regional (e.g., serikat pekerja setempat, LSM yang bergerak di bidang perlindungan HAM, dan/atau ahli hukum) agar dapat memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta syarat/kondisi kerja dan HAM di kawasan spesifik serta berbagai opsi yang tersedia untuk mengatasi risiko dan/atau pelanggaran.





PANDUAN DAN SUMBER DAYA TAMBAHAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL

PANDUAN DAN SUMBER DAYA TAMBAHAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Selain meminta bantuan dari pihak/sumber daya yang merupakan ahli di bidang HAM di tingkat regional, sumber daya berikut ini dapat memberikan landasan bagi para peserta FIP tentang:

- HAM mendasar,
- Hak dasar pekerja,
- Hak pekerja yang khusus terkait sektor pangan laut,
- Keadilan gender,
- Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM,
- Uji tuntas HAM,
- Tanggung jawab sosial yang didorong oleh pekerja, dan
- Mekanisme pengaduan.

HAM MENDASAR

HAM mendasar turut mencakup, paling tidak, hak-hak sebagaimana tercantum dalam International Bill of Human rights (Konstitusi HAM Internasional), termasuk:

- [Universal Declaration of Human Rights \(Deklarasi Universal HAM\)](#)
- [International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights \(Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya\)](#)
- [International Covenant on Civil and Political Rights \(Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik\)](#)

HAK PEKERJA

Hak dasar pekerja meliputi:

- Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama,
- Penghapusan kerja paksa atau wajib kerja,
- Penghapusan pekerja anak, dan
- Penghapusan diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan.

[Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work](#) (Deklarasi Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja) dari International Labour Organization (ILO) memintakan komitmen Negara Anggota ILO untuk menghormati dan memajukan hak-hak dasar pekerja, meskipun negara anggota tersebut masih belum meratifikasi berbagai konvensi ILO yang terkait ([ILO Conventions](#)).

Selain itu, Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan ([ILO Work in Fishing Convention 188](#)) merupakan instrumen internasional yang penting yang menguraikan standar minimum di bidang perburuhan bagi para pekerja di kapal komersial.

KEADILAN GENDER

Keadilan gender⁶ merupakan komponen penting dalam Konstitusi HAM Internasional (International Bill of Human Rights).

Pelajari lebih lanjut:

- [Basic Guidelines for a Gender-Responsive Fishery Improvement Project \(Pedoman Dasar FIP yang Responsif-Gender\)](#)
- [Pacific handbook for gender equity and social inclusion in coastal fisheries and aquaculture \(Buku Pegangan Komunitas Pasifik tentang Keadilan Gender dan Inklusi Sosial dalam Perikanan Pesisir dan Budi Daya Perikanan\)](#)
- [Towards gender-equitable small-scale fisheries governance and development \(Menuju Tata Kelola dan Pengembangan Usaha Perikanan Skala Kecil yang Berkeadilan Gender\)](#)
- [Additional resources on achieving sustainability of small-scale fisheries in the context of food security and poverty eradication \(Sumber daya tambahan dalam mewujudkan aspek keberlanjutan pada usaha perikanan skala kecil dalam konteks ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan\)](#)

TANGGUNG JAWAB BISNIS UNTUK MENGHORMATI HAM

Alliance menyarankan agar FIP membiasakan diri dengan Prinsip Panduan PBB terkait Bisnis dan HAM (UN Guiding Principles for Business and Human Rights) guna memastikan bahwa FIP telah memperhatikan semua risiko terkait HAM, baik yang potensial maupun yang aktual, yang mungkin mereka hadapi, serta peran dan tanggung jawab pelaku usaha dan negara. Secara khusus:

**PRINSIP
13**

Prinsip 13 menyebutkan:

Tanggung jawab untuk menghormati HAM mengharuskan perusahaan untuk: (a) menghindari menjadi penyebab atau turut andil dalam timbulnya dampak buruk terhadap HAM yang diakibatkan oleh kegiatan mereka, dan mengatasinya bila dampak tersebut terjadi; dan (b) berupaya mencegah atau menanggulangi dampak buruk terhadap HAM yang secara langsung terkait dengan kegiatan operasi, produk, atau layanan mereka yang terdapat dalam hubungan usaha mereka, sekalipun mereka sendiri bukanlah pihak yang menyebabkan dampak tersebut.

⁶ "Kesetaraan gender adalah proses bersikap adil (fair) pada laki-laki dan perempuan. Guna memastikan adanya sikap adil ini, perlu ada berbagai upaya untuk mengatasi berbagai ketertinggalan dari aspek historis dan sosial yang menghalangi perempuan dan laki-laki untuk dapat sejajar." (UNESCO Institute for Statistics. "Gender Equity," June 22, 2020. <http://uis.unesco.org/en/glossary-term/gender-equity?wbdisabled=false.>)

Prinsip 14 menyebutkan:

Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM berlaku pada semua perusahaan, terlepas dari besaran, sektor, konteks operasional, kepemilikan, dan struktur usahanya. Akan tetapi, skala dan kompleksitas cara-cara yang digunakan oleh perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab tersebut bisa berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor tersebut dan dengan seberapa parah tingkat dampak buruk terhadap HAM yang timbul⁷.

Pelajari lebih lanjut:

[UN Guiding Principles for Business and Human Rights \(Prinsip Panduan PBB terkait Bisnis dan HAM\)](#)

UJI TUNTAS HAM

Uji tuntas HAM (HRDD/Human Rights Due Diligence) adalah proses spesifik dalam manajemen risiko yang terus berjalan yang perlu diikuti oleh suatu perusahaan guna mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan cara-cara yang dilakukannya dalam mengatasi dampak buruk terhadap HAM yang muncul dalam kegiatan operasional dan rantai pasok perusahaan tersebut. HRDD mencakup empat langkah utama: menelaah dampak aktual dan potensial terhadap HAM, mengintegrasikan dan menindaklanjuti temuan, melacak penanganan yang dilakukan, dan menyampaikan bagaimana dampak tersebut diatasi.

Menurut UNGP, semua perusahaan dalam rantai pasok pangan laut punya tanggung jawab untuk melakukan dan mendukung syarat-syarat dalam HRDD dalam rantai pasok mereka, termasuk di kapal penangkap ikan dan di tingkat kelompok masyarakat, guna memastikan agar tiap pelaku dalam rantai pasok secara rutin melakukan uji tuntas dengan para pemasok mereka yang ada di hulu dan melakukan penanganan atas pelanggaran HAM atau hak pekerja dengan tepat waktu.

Instrumen Kajian Tanggung Jawab Sosial bagi Sektor Pangan Laut ([The Social Responsibility Assessment Tool for the Seafood Sector \(SRA\)](#)) merupakan contoh instrumen kajian cepat atau diagnostik yang dapat digunakan FIP untuk mengidentifikasi area risiko terkait dengan isu-isu sosial. Untuk FIP yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yang diidentifikasi dalam evaluasi mandiri, FisheryProgress mengharuskan agar FIP tersebut mengisi SRA. Alliance menyarankan agar semua FIP mengisi SRA atau instrumen penilaian risiko lain yang setara, terlepas dari hasil evaluasi mandiri. Kajian/penilaian risiko ini hendaknya memperhatikan keseluruhan isu sosial yang ada dalam SRA.

Pelajari lebih lanjut:

Pedoman tambahan terkait cara membangun program HRDD dapat dilihat di Peta Jalan Peningkatan Etika dalam Sektor Pangan Laut ([Roadmap for Improving Seafood Ethics \(RISE\)](#)), suatu sumber daya yang bisa digunakan bebas biaya yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan pangan laut.

⁷ United Nations. 2011. "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, and Remedy' Framework."

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

TANGGUNG JAWAB SOSIAL YANG DIDORONG OLEH PEKERJA

Alliance merekomendasikan agar FIP mengadopsi model tanggung jawab sosial yang didorong oleh pekerja (WSR/worker-driven social responsibility) guna mewujudkan perlindungan HAM yang bermakna dan dapat bertahan lama dalam rantai pasok perusahaan. Model WSR mensyaratkan agar perbaikan sosial:

- Didorong oleh para pekerja dan penangkap ikan,
- Difokuskan pada upaya penegakan, dan
- Didasarkan pada komitmen yang mengikat secara hukum yang menjadikan tanggung jawab untuk meningkatkan syarat/kondisi kerja tersebut ditempatkan pada korporasi global yang ada di puncak rantai pasok.

Pendekatan yang didorong oleh pekerja dan penangkap ikan bisa saja terlihat sangat berbeda di berbagai usaha perikanan yang berskala industri dan berskala kecil. Usaha perikanan skala kecil menghadapi tantangan yang unik, seperti misalnya keberagaman/kemajemukan, sifat dinamik/dinamisme, dan sifat informal yang ada di sektor atau tenaga kerja yang bersangkutan. Usaha perikanan ini bisa saja punya jalur yang terbatas dari segi hukum untuk mendukung proses yang didorong oleh pekerja dan penangkap ikan.

Pelajari lebih lanjut:

- [Worker-Driven Social Responsibility Network's Statement of Principles. \(Pernyataan Prinsip dari Jaringan Tanggung Jawab Sosial Berbasis Pekerja\)](#)
- [International Labor Rights Forum's Four Essential Elements for Independent Monitoring at Sea \(Forum ILO tentang Empat Elemen Esensial dalam Pemantauan Independen di Laut\)](#)
- [The Bangladesh Accord](#) dan [Fair Food Program by the Coalition of Immokalee Workers](#) merupakan contoh praktik terbaik dari sektor lain.
- [Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries \(Pedoman Sukarela untuk Memastikan Usaha Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan\)](#) yang diterbitkan FAO memberikan panduan penting untuk mendorong keterlibatan penangkap ikan, pekerja, dan kelompok masyarakat, yang hanya sebagian dari banyak aspek lainnya dari usaha perikanan skala kecil. Penyusunan Pedoman ini melibatkan konsultasi dengan lebih dari 4.000 peserta dari 120 negara.

MEKANISME PENGADUAN

Penting untuk memastikan agar para pekerja menyadari dan dapat mengakses mekanisme pengaduan yang efektif apabila terjadi pelanggaran. [Verité, Centre for Research on Multinational Corporations](#), dan [ELEVATE](#) memberikan pedoman tentang cara menyusun, menjalankan, dan menggunakan mekanisme pengaduan.

DUKUNGAN BAGI FIP

Dukungan bagi FIP akan dapat membantu melibatkan pelaku usaha tambahan di bidang pangan laut dalam proyek-proyek yang sudah ada serta mendorong permintaan dari pembeli dan pemasok untuk proyek-proyek baru guna meningkatkan usaha perikanan lainnya yang dihadapkan pada masalah lingkungan hidup.

MEMBERIKAN DUKUNGAN PADA FIP

DUKUNGAN KEUANGAN PADA FIP

Merampungkan suatu FIP bisa memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dengan memperhatikan dimensi keuangan pada upaya peningkatan usaha perikanan sejak awal dapat mengurangi risiko yang terkait dengan FIP dan turut andil pada terwujudnya perbaikan yang dapat bertahan lama.

Khususnya penting untuk memastikan agar beban dan ongkos/biaya untuk melakukan peningkatan tidak secara timpang ditanggung oleh pihak produsen. Pembagian ongkos/biaya peningkatan yang tidak adil dapat memperparah ketimpangan yang telah banyak terjadi di rantai pasok pangan laut. Ketimpangan tersebut kemungkinan membahayakan keberhasilan suatu FIP yang kemudian terpaksa memperkecil lingkupnya, membuat jangka waktu pelaksanaan menjadi makin lama, atau keduanya.

Para pembeli dan pemegang merek hendaknya memastikan bahwa mereka mendukung FIP sehingga mereka dapat melakukan kajian dan upaya peningkatan sebagaimana ditetapkan dalam berbagai Pedoman yang ada. Dukungan ini turut mencakup memastikan bahwa FIP mendapatkan sumber daya dengan baik serta mendapatkan dukungan keuangan, sehingga ongkos/biaya peningkatan tidak semata-mata dikenakan pada para produsen dan peserta FIP yang ada di hulu.

MENELAAH ONGKOS/BIAYA DAN ARGUMENTASI USAHA UNTUK MELAKUKAN SUATU FIP

Alliance amat merekomendasikan agar para peserta FIP menyusun anggaran yang memuat perincian ongkos/biaya untuk melakukan peningkatan di bidang sosial dan lingkungan hidup setelah dirampungkannya kajian atas kinerja usaha perikanan. Guna memastikan bahwa FIP dapat berjalan dan bertahan lama, penting agar para peserta FIP secara jelas mengidentifikasi sumber-sumber [dana] untuk menutup ongkos/biaya mereka. Penting untuk diperhatikan bahwa anggaran yang memuat perincian atas ongkos/biaya dan berbagai sumber pendapatan FIP menunjukkan seberapa kuat argumentasi usaha untuk memulai suatu FIP.

Alliance juga merekomendasikan agar FIP melakukan telaah atas kelangsungan dan tanggung jawab para peserta utama FIP selama proses pembentukan FIP, dengan menggunakan perangkat Kajian Cepat Keuangan (FRA/Financial Rapid Assessment) atau perangkat lain yang sebanding. FRA menerapkan prinsip-prinsip dasar terkait kapasitas organisasi serta dasar-dasar analisis kredit yang akan digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengevaluasi suatu perusahaan. Hasil dari kajian keuangan seperti ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk membantu meningkatkan kelangsungan usaha mereka dari aspek ekonomi serta posisinya dalam usaha perikanan sekaligus

memastikan tidak adanya konsekuensi keuangan yang tidak diharapkan. (The United Nations Food and Agriculture Organization serta U.S. Agency for International Development juga menggunakan kajian yang sama.)

Begitu kajian keuangan ini selesai dilakukan, FIP dapat memilih untuk tetap merahasiakan hasil kajian tersebut. Akan tetapi, Alliance merekomendasikan agar FIP melaporkan secara publik bahwa FIP telah melakukan uji tuntas keuangan, baik untuk menunjukkan kelangsungan keuangan para peserta utama FIP dan secara aktif memantau berbagai indikator keuangan penting.

KEPUTUSAN PELAKU USAHA UNTUK TERLIBAT BEKERJA SAMA DALAM FIP

Setelah menelaah informasi yang tersedia bagi publik dan/atau berkonsultasi dengan LSM mitra, perusahaan/pelaku usaha dapat terlibat bekerja sama dalam proyek peningkatan dalam beberapa cara, termasuk di antaranya:

- Ikut serta dalam suatu FIP dengan memberikan kontribusi berupa uang atau barang/jasa, terlibat dalam kegiatan-kegiatan proyek, atau keduanya;
- Mengirimkan surat yang menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut, yang ditujukan ke penyelenggara proyek, perwakilan pemerintah, atau pemasok; dan/atau
- Meminta para pelaku dalam rantai nilai untuk ikut serta dalam proyek atau mengambil sumber dari usaha perikanan yang telah ikut serta dalam FIP aktif.

Para pemangku kepentingan di bidang pangan laut memiliki beragam kriteria untuk merekomendasikan penggunaan sumber dari FIP atau kerja sama dengan perusahaan. Alliance merekomendasikan agar perusahaan yang mengambil sumber dari FIP Pemula mendorong agar FIP tersebut melakukan transisi menjadi FIP Komprehensif seiring dengan waktu. Bila tetap saja tidak ada perbaikan yang terjadi setelah interaksi langsung dengan proyek tersebut, Alliance menyarankan agar perusahaan mengambil langkah-langkah tambahan yang sejalan dengan tujuan dan persyaratan yang diatur dalam kebijakan mereka tentang pangan laut bertanggung jawab, yang bisa mencakup tidak lagi membeli pangan laut dari sumber tersebut dan menyampaikan alasannya.

Keputusan tentang apakah rantai pasok akan melibatkan FIP ada di tangan pembeli, dan akan tergantung pada persyaratan spesifik dalam kebijakan pangan laut bertanggung jawab di perusahaan tersebut. Tujuan utamanya ialah menciptakan insentif bagi terwujudnya perubahan yang positif dan dapat diukur di lautan dan pada pasokan pangan laut kita semua.



PENANDATANGAN

Para penandatangan berikut ini menyatakan dukungan mereka terhadap Pedoman untuk Mendukung Proyek Peningkatan Perikanan (Guidelines for Supporting Fishery Improvement Projects)

Para penandatangan turut mencakup:

- **Perusahaan yang membeli dan menjual pangan laut:** Para penandatangan ini berkomitmen menggunakan Pedoman ini sebagai dasar bagi FIP tempat mereka ikut serta, dan, bila memungkinkan, mengambil sumber dari FIP yang sejalan dengan Pedoman ini.
- **Organisasi yang berpartisipasi dalam FIP atau memberikan arahan kepada pelaku usaha yang mengambil sumber dari FIP:** Para penandatangan ini berkomitmen menggunakan pedoman ini sebagai dasar bagi FIP mereka dan memajukan FIP yang sejalan dengan Pedoman ini.

AP2HI

CeDePesca

Conservation International

Global Seafood Alliance

Qingdao Marine Conservation Society

SmartFish Rescate de Valor, AC

World Wildlife Fund - US

- **Individu, kolaborasi pra-kompetisi, dan perusahaan serta organisasi lain:** Para penandatangan ini telah menyatakan dukungan mereka untuk mendukung Pedoman ini serta kesediaan mereka untuk mempromosikannya.

FishChoice

FISH Safety Foundation

A PROJECT OF THE



CONSERVATION ALLIANCE
FOR SEAFOOD SOLUTIONS

SOLUTIONSFORSEAFOOD.ORG